

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak adanya reformasi keuangan daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kinerja Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap cara mengelola yang baik dan benar hingga dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang. Pemberian hak otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan.

Otonomi daerah memberikan kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. APBD mempunyai suatu rencana pendapatan dan belanja tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD di DKI Jakarta.

Nugraini (2012:2) berpendapat bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah menduduki posisi utama dalam upaya pengembangan kapabilitas, efesiensi, dan efektifitas pemerintah daerah dalam satu ruang lingkup.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara baik. Dalam kinerja penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget maka seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran

sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis dalam kinerja sebagai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di DKI Jakarta terbagi menjadi enam wilayah yaitu Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikut ini disajikan mengenai Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun 2015 – 2018 sebagai berikut:

Tabel I. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015 – 2018

Tahun	Anggaran Belanja	Anggaran Pendapatan
2015	Rp. 67.440.960.137.048	Rp. 70.580.705.185.641
2016	Rp. 60.946.012.455.782	Rp. 63.573.284.925.993
2017	Rp. 72.214.786.236.844	Rp. 65.714.221.072.554
2018	Rp. 73.680.027.776.316	Rp. 75.886.377.073.448

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015- 2018

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja pada kesatuan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 hingga 2016 adanya penurunan. Dan hal berbeda terjadi pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan adanya kenaikan. Sedangkan pada Anggaran Pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga 2016 dan adanya peningkatan kembali pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini belum bisa menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikatakan baik atau tidak.

Tabel I. 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pedapatan
2015	Rp. 63.650.196.836.603	Rp. 63.860.859.019.546
2016	Rp. 59.945.522.786.232	Rp. 59.004.784.464.142
2017	Rp. 74.583.945.113.274	Rp. 60.514.221.072.554
2018	Rp. 75.680.027.776.316	Rp. 64.886.377.073.448

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015-2018

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan, dan 2017 hingga 2018 mengalam kenaikan kembali. Dan hal yang terjadi sama pada Realisasi Pendapatan mengalami penurunan terjadi pada tahun 2015 - 2016. Serta mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada tahun 2019 memiliki sebesar Rp. 89.088.351.842.504 dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7%. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut. Anggaran tersebut akan dialokasikan sebagai Belanja Langsung dan Tidak Langsung dan dana tersebut harus di distribusikan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah disetujui. (sumber: <https://www.viva.co.id/berita/metro/1100871-infografik-apbd-dki-2019-naik-lihat-rinciannya> pada Kamis, 6 Desember 2018 diakses pada Minggu, 24 Maret 2019).

Perubahan APBD tersebut akan berpengaruh pada pembagian distribusi APBD dengan enam wilayah.Salah satu contohnya adalah terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu pusat perekonomian di DKI Jakarta yang terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. APBD yang

akan dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pertumbuhan daerah pada masyarakat yang memiliki ruang lingkup signifikan yaitu terjadi di walikota.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN TERHADAP REALISASI PADA KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (2015 - 2018)**. Dengan sumber data yang diperoleh dari Kantor Walikota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian atas kinerja anggaran dan realisasi pendapatan daerah pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur selama periode (2015 – 2018) jika dilihat dari varian pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana penilaian atas kinerja anggaran dan realisasi belanja daerah pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur selama periode (2015 – 2018) jika dilihat dari varian belanja, pertumbuhan belanja, belanja operasi, dan belanja modal daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja anggaran dan realisasi pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2015 - 2018 dengan menggunakan Alat Analisis.
2. Untuk mengetahui kinerja anggaran dan realisasi belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2015 -2018 dengan menggunakan Alat Analisis.
3. Untuk mengetahui kinerja dalam pengelolaan APBD terhadap penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.

Manfaat dari penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengetahuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi serta tambahan referensi dan pendapat bagi Pemerintah Walikota Administrasi Jakarta Timur dalam menentukan kebijakan serta menentukan strategi baru untuk meningkatkan atas kualitas kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang terdiri dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.